



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Susunan Dewan Penguji	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	xiii
Abstract	xiv
1. BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan teori	16
2.2. Pro dan Kontra tentang Pidana Mati	27
2.3. Tentang Dasar Hukum Pidana Mati	37
2.3.1. Agama dan Budaya/Adat Istiadat	37
2.3.2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	39
2.3.3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun	41



2009 tentang Narkotika

2.3.4.	Dalam Undang-undang Psikotropika	43
2.3.5.	Dalam Undang-undang Korupsi	44
2.3.6.	Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia	45
2.3.7.	Dalam Undang-undang Darurat tahun 1950	45
2.3.8.	Dalam Undang-undang Perlindungan Anak	45
2.3.9.	Dalam Undang-undang No. 21/1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi	45
2.3.10.	Dalam Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi	46
2.3.11.	Dalam Undang-undang Nomor 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan- ketentuan Tenaga Atom	47
2.3.12.	Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Penerapan Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang- undangan Pidana Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	48
2.3.13.	Undang-undang Nomor 9 tahun 2008	49



	Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia	
2.3.14.	Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung Dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan	50
2.4	Tentang Permohonan Grasi Dan Upaya Hukum Luar Biasa	50
2.4.1.	Grasi	50
2.4.2.	Upaya Hukum Luar Biasa PK	60
2.5	Tentang Regulasi Pelaksanaan Pidana Mati	63
2.5.1.	Tata Pelaksanaan Pidana Mati Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU No. 2/PNPS/1964)	63
2.5.2.	Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010	66
2.5.3.	Dasar mengeksekusi Terpidana Mati Dan Teknis Mengenai Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Berdasarkan Surat Jaksa Agung Nomor 235/E/1994, Tanggal 4 Maret 1994	70
3.	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>76</b>
3.1.	Metode Penelitian	76



3.2.	Pendekatan Penelitian	77
3.3.	Metode pengumpulan Data :	78
3.3.1.	Sifat Penelitian	79
3.3.2.	Metode Pendekatan	79
3.3.3.	Teknik Pengumpulan Data	81
3.3.4.	Analisis Data	82
4.	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>83</b>
4.1.	Mekanisme Yang Menghambat Dalam Pelaksanaan Pidana Mati	84
4.2.	Implikasi Dari Berlarut-larutnya Proses Eksekusi Mati	111
4.2.1.	Bagi Terpidana Mati	111
4.2.2.	Bagi Negara	113
4.2.3.	Bagi Aparat Penegak Hukum	115
4.2.4.	Bagi Masyarakat	116
5.	<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>118</b>
5.1.	Kesimpulan	118
5.2.	Saran	120
	Daftar Pustaka	Xv